



KEDATANGAN PRESIDEN AS JOE BIDEN DI CHICAGO

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat saat kedatangannya di Bandara Internasional Chicago O'Hare di Chicago, Illinois, AS, Kamis (7/10).

Negara Barat Berencana Terbangkan Uang Tunai ke Afghanistan

Uang itu rencananya akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

BRUSSELS(IM) – Pejabat internasional berencana untuk menerbitkan uang tunai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di Afghanistan, sambil menghindari membiayai pemerintahan Taliban, demikian diungkap beberapa orang yang mengetahui rencana rahasia itu. Perencanaan untuk pengiriman uang tunai dilakukan di saat ekonomi Afghanistan runtuh dengan cepat. Para diplomat masih memperdebatkan apakah negara-negara Barat dapat menuntun Taliban membuat konsesi sebagai imbalan bantuan ekonomi, demikian menurut dokumen kebijakan internal yang dilihat oleh Reuters.

Pendanaan darurat, yang bertujuan untuk mencegah krisis kemanusiaan dalam menghadapi kekeringan dan pergolakan politik, itu dilakukan dengan menerbitkan uang kertas dolar Amerika Serikat (AS) ke Kabul untuk didistribusikan melalui bank dengan pembayaran kurang dari USD200. Rencana ini dilakukan dengan izin dari Taliban, tetapi tanpa keterlibatan mereka. Selain mengirimkan uang tunai untuk membendung krisis langsung, negara-negara donor ingin membentuk dana perwalian "kemanusiaan-plus" yang akan membayar gaji dan menjaga sekolah dan rumah sakit tetap buka, kata dua pejabat senior.

Banyak orang Afghanistan mulai menjual harta benda mereka untuk membayar makanan yang semakin langka. Kepergian pasukan pimpinan AS dan banyak donor internasional ikut menghilangkan dana hibah yang digunakan Afghanistan untuk membiayai 75% dari pengeluaran publiknya, menurut Bank Dunia. Strategi Barat yang tidak biasa ini mencerminkan dilema yang mereka hadapi. Di satu sisi Barat masih ingin membantu Afghanistan setelah dua dekade perang, dan untuk mencegah migrasi massal, namun di sisi lain mereka enggan memberikan uang kepada Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus dan belum menunjukkan perubahan signifikan dari cara mereka memerintah negara itu antara tahun 1996 hingga 2001. Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) telah memperingatkan bahwa 14 juta warga Afghanistan telah menghadapi kelaparan. Program Pangan Dunia PBB (WFP) telah mendistribusikan sekitar 10 juta warga Afghanistan (USD110.000) tunai melalui bank lokal dan bermaksud untuk mencairkan lebih cepat, kata seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut. Diterbangkannya uang tunai itu adalah percobaan untuk pengiriman dolar yang lebih besar melalui udara dari Pakistan, kata seorang sumber. Seorang diplomat senior mengatakan dua pendekatan sedang dipertimbangkan yang akan menyuntikkan uang tunai ke dalam ekonomi Afghanistan. Keduanya dalam tahap perencanaan. Di bawah rencana pertama, WFP akan menerbangkan uang tunai dan mendistribusi-

busikannya langsung kepada orang-orang untuk membeli makanan, memperluas sesuatu yang telah dilakukan badan tersebut dalam skala yang lebih kecil. Pendekatan kedua akan melihat arus kas masuk untuk disimpan oleh bank atas nama PBB. Kas itu akan digunakan untuk membayar gaji staf badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah. Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana pengiriman uang tunai tersebut. Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya akan mengizinkan bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional dan non-pemerintah yang independen sambil "menolak aset" kepada Taliban dan memberi sanksi kepada para pemimpinnya. ● tom

Dewan HAM PBB Batalkan Resolusi Misi di Yaman

JENEWA(IM) - Bahrain, Rusia, dan anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) mendorong melalui pemungutan suara resolusi untuk perang di Yaman pada Kamis (7/10). Pemungutan suara ini dinilai sebagai kekalahan yang menyakitkan bagi negara-negara Barat yang berusaha untuk menjaga misi tetap berjalan. Para anggota memilih untuk menolak resolusi yang dipimpin oleh Belanda. Dorongan ini memberikan waktu dua tahun lagi kepada para penyelidik independen untuk memantau kekejaman dalam konflik Yaman. Ini menandai pertama kalinya dalam 15 tahun sejarah Dewan HAM PBB sebuah resolusi dikalahkan. Dalam pemungutan suara yang diadakan oleh sekutu Saudi, Bahrain, dengan 21 negara memberikan suara menentang resolusi Belanda termasuk China, Kuba, Pakistan, Rusia, Venezuela, dan Uzbekistan. Sedangkan sebanyak 18 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman memilih untuk mendukungnya. Ada tujuh suara abstain dan delegasi Ukraina tidak hadir. Amerika Serikat hanya memiliki status pengamat. Selama debat, Duta Besar Bahrain untuk PBB Yusuf Abdulkarim Bucheeri mengatakan kelompok penyelidik internasional telah berkontribusi menyebarkan informasi yang salah tentang situasi di lapangan di Yaman. Sedangkan Duta Besar Belanda untuk PBB Peter Bekker mengatakan pemungutan suara itu merupakan kemunduran besar. "Saya tidak bisa tidak merasa bahwa Dewan ini telah mengecewakan rakyat Yaman," kata Bekker kepada para delegasi. Para penyelidik independen

pernah mengatakan di masa lalu potensi kejahatan perang telah dilakukan oleh semua pihak dalam konflik tujuh tahun Yaman. Konflik ini mengadu koalisi pimpinan Arab Saudi melawan Houthi yang bersekutu dengan Iran. Lebih dari 100 ribu orang tewas dan 4 juta mengungsi. "Dengan pemungutan suara ini, Dewan telah secara efektif mengakhiri mandat pelaporannya, itu telah memotong jalur kehidupan rakyat Yaman ke komunitas internasional," ujar Bekker. Sekretaris PBB Jenderal Antonio Guterres masih percaya ada kebutuhan untuk akuntabilitas di Yaman. "Kami akan terus mendesak pertanggungjawaban di Yaman, tempat di mana warga sipil telah melihat kejahatan berulang yang dilakukan terhadap mereka," kata juru bicara Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan di New York. Duta Besar Jerman untuk PBB Katharine Stasch menyatakan mereka mengakui upaya koalisi yang dipimpin Saudi untuk menyelidiki klaim korban sipil melalui tim penilai insiden bersama. "Kami yakin sangat diperlukan untuk memiliki mekanisme internasional independen yang diamankan oleh PBB yang bekerja menuju pertanggungjawaban untuk rakyat Yaman," ujarnya di Jenewa. Aktivis hak mengatakan pekan ini bahwa Arab Saudi melobi keras terhadap resolusi Barat. Kerajaan bukan anggota pemungutan suara di Dewan HAM PBB dan delegasinya tidak menanggapi permintaan berkomentar. Ketua kelompok aktivis independen Yaman Mwatana untuk Hak Asasi Manusia, Radhya Almutawakel, mengatakan dia sangat kecewa dengan hasilnya. "Dengan memberikan suara menentang pembaruan GEE hari ini, negara-negara anggota PBB telah memberikan lampu hijau kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melanjutkan kampanye kematian dan penghancuran mereka di Yaman," katanya merujuk pada penyelidik yang dikenal sebagai Kelompok Pakar Terkemuka. ● gul

Dituduh Bayar Media, Kanselir Austria Diusut Kejaksan

WINA (IM) - Kejaksan Austria dalam rilis yang dikeluarkan hari Rabu (6/10) mengatakan, telah melakukan pengecekan di beberapa lokasi, termasuk di dua gedung Kementerian sebagai bagian dari penyelidikan. Menteri Keuangan Gernot Blumel mengkonfirmasi ada pengecekan di kementeriannya. Media di Austria juga melaporkan, kantor kekanseliran juga menjadi salah satu target pengecekan. Pihak Kejaksan menyebutkan, kanselir Sebastian Kurz dan sembilan orang lainnya, serta tiga organisasi, sedang disidiki atas tuduhan persekongkolan manipulasi berita. Inti dari tuduhan tersebut adalah, antara 2016 dan 2018, "sumber daya dari kementerian keuangan digunakan untuk membiayai jajak pendapat yang dimanipulasi, sebagian untuk melayani kepentingan politik partai secara eksklusif". Periode itu adalah ketika Sebastian Kurz mengambil alih kepemimpinan partai konservatif Austria OeVP. Setelah menang pemilu, Sebastian Kurz kemudian memimpin pemerintahan dan berkoalisi dengan partai liberal kanan FPÖ.

Kanselir Austria, Sebastian Kurz dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantornya mengatakan, tuduhan yang dilayangkan kepadanya "dibuat-buat", dan percakapan dan pesan-pesan lewat ponsel yang menjadi dasar kasus itu telah "diambil di luar konteks". Dia mengatakan yakin bahwa namanya pada akhirnya akan dibersihkan. Pers Austria menyebut bahwa outlet media yang dimaksud adalah tabloid "Oesterreich". Tetapi kelompok yang menjalankan tabloid itu membantah semua tuduhan itu. Presiden Austria, Alexander Van der Bellen dalam pidatonya Rabu malam (6/10) meminta para polisi untuk menghormati independensi lembaga peradilan, dan mengatakan tuduhan bahwa kejaksaan bermotif politik telah "melangkahi batas dengan cara yang tidak dapat diterima". Dia menggambarkan peristiwa hari Rabu sebagai "tidak biasa dan serius", tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Tuduhan-tuduhan terbaru ini menjadi tekanan baru pada partai OeVP dan pemerintahan koalisinya dengan Partai Hijau. OeVP sebelumnya sudah terlibat berbagai skandal dan menjadi sorotan media.

FPÖ, Christian Strache, dijawab wartawan di tempat liburannya di Ibiza, dengan mengirim seorang perempuan cantik yang mengaku keponakan konglomerat Rusia. Dalam percakapan yang diadukan direkam dengan kamera tersembunyi, Strache menawarkan proyek pemerintah sebagai imbalan, jika keluarga konglomerat Rusia membantu kampanyenya dalam pemilu, dengan membayar media atau membeli perusahaan media untuk menurunkan berita-berita positif. Ketika itu, Christian Strache menjabat sebagai Wakil Kanselir sekaligus Menteri Pelayanan Sipil dan Olahraga dalam pemerintahan koalisi. Setelah rekaman video itu dirilis media, Strache terpaksa meletakkan jabatan dan mengundurkan diri sebagai pimpinan partainya, FPÖ. Sebastian Kurz ketika itu tetap bertahan sebagai kanselir dan membentuk koalisi baru dengan Partai Hijau. Sejak skandal Ibiza, Kejaksan Austria melakukan penyelidikan luas yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi lainnya, termasuk terhadap Menteri Keuangan Gernot Blumel. Sebastian Kurz ketika itu juga dipanggil untuk memberi kesaksian, namun belum diperiksa sebagai tersangka. Dengan penyelidikan dan pengecekan terbaru, posisi Sebastian Kurz di puncak pemerintahan Austria makin terancam. ● tom

PENGUMUMAN
Direksi PT SULAWESI SUGAR PLANTATION, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditur Perseroan mengenai rencana penurunan modal dasar dari sebelumnya Rp.18.000.000.000,- menjadi Rp.600.000.000,- serta penurunan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp.4.500.000.000,- menjadi Rp.600.000.000,-.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 9 Oktober 2021
Direksi
PT SULAWESI SUGAR PLANTATION



BANDARA JEWEL CHANGI DI SINGAPURA

Orang-orang berjalan melewati air terjun dalam ruangan di Bandara Jewel Changi di Singapura, Kamis (7/10).

Pelapor PBB Serukan Pelonggaran Sanksi Terhadap Korut

NEW YORK(IM) - Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara, Tomas Ojea Quintana, menilai Dewan Keamanan PBB harus melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi tersebut telah menyebabkan krisis ekonomi yang mendalam, dan risiko kelaparan di Korea Utara. "Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus ditinjau dan dikurangi untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa, serta untuk memungkinkan promosi hak atas standar hidup yang layak dari warga negara biasa," kata Ojea Quintana dalam laporan yang akan dipresentasikan pada 22 Oktober. Korea Utara tidak mengakui mandat atau bekerja sama dengan Ojea Quintana. Misi hak asasi manusia PBB di Jenewa tidak menanggapi permintaan komentar. Sementara pemerintah di Pyongyang tidak menerima pertanyaan dari media asing.

Pada Juni lalu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan, Korea Utara terancam mengalami kekurangan pangan karena bencana alam tahun lalu. Kim mengakui bahwa, warga telah menghadapi kesulitan selama pandemi. Pada April, pejabat Korea Utara menyebut laporan PBB tentang kekurangan gizi anak sebagai kebohongan belaka. Sejauh ini Korea Utara belum melaporkan kasus Covid-19 dan telah memberlakukan tindakan pencegahan yang ketat. Korea Utara memberlakukan penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan domestik sejak awal pandemi. Ojea Quintana mengatakan, banyak warga Korea Utara yang mengandalkan kegiatan komersial di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok. Namun selama penutupan perbatasan, mereka telah kehilangan pendapatan. Kondisi ekonomi mereka diperparah oleh dampak sanksi. "Akses masyarakat terhadap makanan adalah masalah serius, anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan," ujar Ojea Quintana. Ojea Quintana mengatakan, Korea Utara mengalami kekurangan obat-obatan penting dan pasokan medis. Selain itu, organisasi kemanusiaan tidak dapat memasok obat-obatan dan persediaan lainnya, karena penutupan perbatasan. Sebagian besar diplomat dan pekerja bantuan telah meninggalkan Korea Utara di tengah pembatasan perjalanan yang ketat, dan kekurangan barang-barang penting serta fasilitas kesehatan. Selain itu, kemajuan vaksinasi, kesehatan perempuan dan anak-anak, serta air dan sanitasi telah terkikis. "Situasi kemanusiaan yang memburuk saat ini bisa berubah menjadi krisis dan harus dihindari," kata Ojea Quintana. Ojea Quintana menyuarakan keprihatinan bahwa, tantangan untuk mendapatkan informasi di Korea Utara semakin besar. Hal ini mengarah pada sikap apatis yang menjalar dalam perhatian global terhadap situasi hak asasi manusia yang memburuk di Korea Utara. Ojea Quintana menyerukan untuk meredakan ketegangan militer di Semenanjung Korea. Dia juga mendesak Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk mengirim sinyal yang jelas, agar dapat menghidupkan kembali diplomasi yang bertujuan mengamankan denuklirisasi Korea Utara. Ojea Quintana menyambut baik janji Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Mei lalu untuk bekerja memperbaiki situasi hak-hak Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri pertemuan Komite Sentral Partai Pekerja Korea di Pyongyang, Korea Utara, 8 Februari 2021 hingga 11 Februari 2021. ● gul

Kasus Korona Menurun, UEA Bersiap Hidup Normal Lagi

ABU DHABI (IM) - Otoritas Uni Emirat Arab (UEA) mendeklarasikan negaranya telah mengatasi krisis virus Corona (Covid-19). Bulan ini, UEA mencatat jumlah kasus Corona terendah di wilayahnya, sejak musim panas tahun lalu. Seperti dilansir AFP, Jumat (8/10), pernyataan itu disampaikan Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, dalam rekaman video yang dirilis kantor berita UEA, WAM News Agency. "Saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa kehidupan kita harus kembali normal," ucap Mohammed bin Zayed yang merupakan penguasa de-facto UEA dalam pernyataan via video itu. "Ada beberapa perubahan dalam cara kita bekerja, dalam studi keluarga atau kehidupan pribadi kita, tapi kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semuanya," ujarnya. "Kita juga bersyukur bahwa kita telah mengatasi krisis ini, dengan aman, dalam kesehatan yang baik dan dengan pengala-

man, di mana kita membayar harga, tapi kita belajar banyak," imbuh Mohammed bin Zayed dalam pernyataannya. Tujuh emirat UEA mencatat kurang dari 200 kasus baru Corona pada bulan ini -- angka terendah sejak Agustus tahun lalu. Sementara kehidupan di UEA sebagian besar kembali normal, otoritas setempat masih menerapkan secara ketat aturan wajib masker dan social distancing. Dubai mengadakan Expo 2020 Dubai yang berlangsung 6 bulan sejak dibuka 1 Oktober lalu setelah tertunda setahun, untuk menarik jutaan pengunjung dan mendorong perekonomian yang terdampak pandemi Corona. Dubai yang sangat bergantung pada pariwisata, menjadi salah satu tujuan yang membuka pintunya kembali bagi para pelancong, dengan menerima turis mulai Juli tahun lalu. Sementara Abu Dhabi lebih berhati-hati, dengan baru memusnahkan untuk membuka pintu bagi pelancong pada Desember lalu. ● ans



BENCANA GEMPA DI PAKISTAN

Warga berdiri di tengah puing-puing rumah yang rusak setelah gempa bumi di Harnai, Balochistan, Pakistan, Kamis (7/10).

Rusia Janji Tanggapi Pengusiran Diplomatnya dari Misi NATO

MOSKOW (IM) - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, Jumat (8/10) menyebutkan, Rusia akan menanggapi keputusan NATO mencabut akreditasi delapan diplomat Rusia pada misi NATO di Brussels. Zakharova mengatakan pada konferensi pers di Moskow bahwa langkah itu sudah diprediksikan sebelumnya, tetapi pengabaian koalisi terhadap aturan kesopanan mengejutkannya, karena NATO tidak memberikan penjelasan atau alasan untuk mengusir diplomat Rusia. NATO membatalkan akreditasi delapan anggota misi Rusia pada Rabu, serta mengklaim bahwa mereka adalah "pervira intelijen Rusia yang tidak diumumkan". Seorang pejabat NATO mengatakan aliansi itu telah mengurangi jumlah posisi yang dapat diakreditasi Rusia dari

20 menjadi 10 orang. "Keengganan anggota NATO dan institusi NATO sendiri untuk bekerja sama telah menjadi sangat jelas dan tidak dapat ditarik kembali," tekan dia. Zakharova menuduh sekretariat NATO munafik, dan menyatakan bahwa "baru-baru ini" meminta untuk menunjuk perwakilan permanen Rusia ke Brussels, agar tidak membatasi kontak dengan tingkat charge d'affaires di sana. Hubungan NATO-Rusia telah tegang dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah aneksasi ilegal Rusia atas Krimea pada 2014 dan dugaan insiden peracunan pemimpin oposisi negara itu Alexey Navalny tahun lalu. Sebelumnya pada 2018, NATO telah membatalkan akreditasi tujuh pejabat Rusia atas tuduhan meracuni mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal. ● tom